



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/1/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA KHUSUS**

**PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diajukannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2024 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun dan berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penyampaian Pandangan sekaligus Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2023 pada tanggal 26 Januari 2024, telah diputuskan bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 yang diajukan disetujui dengan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk melaksanakan perubahan dan penyempurnaan terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD;

- Memperhatikan :**
1. Surat Bapemperda DPRD Kota Madiun tanggal 19 Januari 2024 Perihal Usulan Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024;
  2. Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 19 Januari 2024 Nomor 170/0138/401.040/2023 Perihal Permintaan Anggota Pansus DPRD Kota Madiun Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  3. Surat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun tanggal 19 Januari 2024 Nomor 002/F.PDIP/I/2024 Perihal Pengusulan Anggota Pansus DPRD Pembahasan Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  4. Surat Ketua Fraksi Perindo DPRD Kota Madiun tanggal 19 Januari 2024 Nomor /F.Perindo/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  5. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Madiun tanggal 19 Januari 2024 Nomor 1/FPKB/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  6. Surat Ketua Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun tanggal Januari 2024 Nomor /F.PKS-PAN/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  7. Surat Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Madiun tanggal 20 Januari 2024 Nomor 00020/F.Demokrat/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  8. Surat Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tanggal 20 Januari 2024 Nomor 03/F.Gerindra/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;
  9. Surat Ketua Fraksi PSI-NASDEM DPRD Kota Madiun tanggal 22 Januari 2024 Nomor 002/F.PSI-NASDEM/I/2024 Perihal Anggota Pansus DPRD Pembahasan 3 (tiga) Raperda Kota Madiun Tahap I Tahun 2024;

10. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 25 Januari 2024 dengan Acara Penyampaian Nota Penjelasan Bapemperda/Pengusul atas 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024;
11. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 26 Januari 2024 dengan Acara Pengambilan Keputusan yang didahului dengan Penyampaian Pandangan sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas 3 Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024;
12. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun tanggal 26 Januari 2024 dengan acara Penetapan Panitia Khusus DPRD Pembahasan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024;

#### M E M U T U S K A N

#### MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran-lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Raperda Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 yang akan dibahas sebagaimana Diktum “KESATU” adalah:
1. Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  2. Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; dan
  3. Raperda tentang Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
- KETIGA** : Tugas-tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” sebagai berikut:
1. menyempurnakan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024;

2. melaksanakan Pendampingan Tim Ahli dalam rangka penyusunan, pembahasan dan Finalisasi Pembahasan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 dengan tenaga ahli;
3. melakukan harmonisasi atas 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 dengan Kanwil Kemenkumham;
4. melaksanakan uji publik Rancangan Peraturan Daerah dengan masyarakat dan/atau *stake holder*;
5. melaksanakan Rapat Dengar Pendapat pembahasan dan finalisasi pembahasan 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 dengan Tim Harmonisasi dan Pembahasan Raperda Pemerintah Kota Madiun; dan
6. melaksanakan fasilitasi atas 3 (tiga) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Inisiatif DPRD Tahap I Tahun 2024 dengan Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

**KEEMPAT** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberi waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.

**KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 26 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN

Ketua,

ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.



Lampiran I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/1/2024  
TANGGAL : 26 JANUARI 2024

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I (SATU) DPRD  
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2024  
TERHADAP RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

1. Ketua : HANDOKO BUDI SETYO, S.H.
2. Wakil Ketua : YUNITA ALIYA WIJAYANI, S.Psi., M.Pd.
3. Anggota : ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.
4. Anggota : SIGIT AHIMSA
5. Anggota : Drs. SUYARTO, M.Pd.
6. Anggota : Y. RUDY WISNU WARDHANA, S.S.
7. Anggota : drg. INDAH SAT RACHMANIATI
8. Anggota : ISMIATI, S.H., S.Pd.
9. Anggota : Drs. SUGENG, S.H., M.H.
10. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MADIUN



ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/1/2024  
TANGGAL : 26 JANUARI 2024

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II (DUA) DPRD  
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2024  
TERHADAP RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI  
DAERAH**

1. Ketua : Drs. GANDHI HATMOKO, M.Si.
2. Wakil Ketua : YULIANA
3. Anggota : Drs. ISTONO, M.Pd.
4. Anggota : H. AGUS WIYONO, S.H.
5. Anggota : Drs. SUTARDI
6. Anggota : HARI SANTOSO, S.T.
7. Anggota : TUTIK ENDANG SRI WAHYUNI
8. Anggota : RINA HARYATI, S.T., M.M.
9. Anggota : Drs. SUBYANTARA
10. Anggota : dr. ENRICO JONATHAN HARTONO, M.H.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ketua,  
ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.

Lampiran III : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.040/1/2024  
TANGGAL : 26 JANUARI 2024

---

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD  
PEMBAHASAN RAPERDA INISIATIF DPRD TAHAP I TAHUN 2024  
TERHADAP RAPERDA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN  
SARANA PERDAGANGAN**

1. Ketua : H. NUR SALIM, S.Pd.I.
2. Wakil Ketua : ERLINA SUSILORINI, S.Si., Apt., M.M.
3. Anggota : Drs. H. ARMAYA
4. Anggota : H. NGEDI TRISNO YHUSIANTO, S.H., M.Hum.
5. Anggota : DODIK DANANG SETIAWAN
6. Anggota : IHSAN ABDURRAHMAN SIDDIQ
7. Anggota : F. BAGUS PANUNTUN
8. Anggota : SLAMET HARIYADI
9. Anggota : SUDJARWO, S.T.
10. Anggota : DEDI TRI ARIFIANTO, S.E.
11. Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris DPRD Kota Madiun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Ketua,  
ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, S.H.